



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Agustus 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRIK LEWERISSA
2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI
3. NHK : 182478

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.300.000.000**

1. Tanah Seluas 970 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/97 m2 di KAB / KOTA KOTA
AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 118 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 1.000 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 14.830 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 7.810 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 2.857 m2/2.857 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **629.000.000**

1. MOBIL, JEEP CHEROKEE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000



3. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000
4. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
6. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	42.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.460.006
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.994.460.006
III. HUTANG	Rp.	900.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.094.460.006

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.